



Analisis Kebijakan Moneter Non-Suku Bunga: Mengapa Bank Indonesia Menghindari Kenaikan BI-Rate di Tengah Gejolak Geopolitik Timur Tengah

Aura Ashfia Al Kautsar¹, Tri Nita Febriyani², Wahyu Eko Setiawan³, Rinda Asyuti⁴

^{1,2,3,4} Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹aura.ashfia.al.kautsar24046@mhs.uingusdur.ac.id, ²tri.nita.febriyani24014@mhs.uingusdur.ac.id,

³wahyu.eko.setiawan24161@mhs.uingusdur.ac.id, ⁴rinda.asyuti@uingusdur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan moneter non-suku bunga sebagai strategi stabilisasi alternatif di tengah guncangan eksternal yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada tahun 2026. Berbeda dengan kerangka kerja konvensional yang berpusat pada suku bunga, penelitian ini menyoroti pergeseran strategis Bank Indonesia dalam mempertahankan suku bunga kebijakannya sambil mengoptimalkan instrumen pro-pasar, termasuk Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI), intervensi valuta asing, dan Transaksi Mata Uang Lokal (LCT). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif berdasarkan analisis dokumen kebijakan dan indikator makroekonomi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bauran kebijakan ini tidak hanya meredam tekanan depresiasi nilai tukar dan menjaga inflasi tetap dalam target, tetapi juga mempertahankan intermediasi perbankan dengan risiko kredit yang terkendali. Secara teoritis, penelitian ini menantang dominasi kebijakan moneter berbasis suku bunga dan menggarisbawahi relevansi kerangka kerja bauran kebijakan dalam merespons guncangan eksternal. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dengan memberikan wawasan empiris mengenai instrumen moneter alternatif di negara-negara berkembang.

Kata Kunci: Kombinasi Kebijakan, Kebijakan Moneter, SRBI, Nilai Tukar, Stabilitas Keuangan

1. Pendahuluan

Meningkatnya gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah pada tahun 2026 telah memicu ketidakpastian global yang signifikan, berdampak pada lonjakan harga komoditas energi dunia salah satunya minyak mentah. Merujuk pada data pasar dari Trading Economics (2026), harga minyak mentah jenis Brent melambung hingga menembus level psikologis USD 101,78 per barel, sementara minyak mentah jenis WTI berada pada kisaran USD 92,89 per barel dengan kenaikan harian yang tajam mencapai 3,59%. Bagi Indonesia, lonjakan harga energi global disertai dengan penguatan indeks Dolar AS (Safe Haven Currency) menimbulkan tekanan depresiasi pada nilai tukar Rupiah. Seperti yang tercantum dalam siaran pers Bank Indonesia (2026), nilai tukar Rupiah pada 21 April 2026 tercatat sebesar Rp17.140 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 0,87% (ptp) jika dibandingkan dengan level pada akhir Maret 2026. Dalam kondisi normal, Bank Indonesia biasanya akan menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) untuk menarik minat investor. Namun, langkah tersebut berisiko memperlambat ekonomi karena membuat bunga kredit di perbankan menjadi lebih mahal bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia memilih strategi yang lebih fleksibel. Seperti yang tercantum dalam siaran pers Bank Indonesia (2026), Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 21-22 April 2026 telah mengambil keputusan untuk tetap menetapkan BI-Rate pada angka 4,75%. Keputusan ini dibarengi dengan optimalisasi instrumen moneter non-suku bunga, yang dibuktikan dengan posisi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang telah mencapai Rp885,41 triliun, di mana kepemilikan nonresiden mencapai 18,75% dari total outstanding. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat stabilitas melalui intervensi di pasar valuta asing serta perluasan instrumen operasi moneter menggunakan valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH). Implementasi berbagai instrumen pasar tersebut terbukti efektif menarik modal asing dengan catatan aliran masuk bersih senilai 1,9 miliar dolar AS. Kondisi ini dibarengi dengan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang tetap terkendali pada level rendah, yakni 3,48% (yoy) hingga Maret 2026.

Penelitian ini merujuk pada sejumlah literatur terdahulu guna memetakan kompleksitas hubungan antara stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Taufiq (2023) mengungkapkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara peningkatan BI-Rate dengan volume penyaluran kredit pada sektor perbankan konvensional di Indonesia, meskipun temuan pada variabel kurs menunjukkan hasil yang tidak seragam. Sementara itu, Celesta dan Ariesa (2022) dalam temuannya menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar Rupiah secara parsial tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyaluran kredit di segmen tertentu, seperti UMKM. Hal ini selaras dengan argumen Judijanto dkk. (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan

moneter sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro secara holistik, di mana koordinasi antara kebijakan moneter dan stabilitas kurs menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, penelitian Laili (2025) menemukan bahwa instrumen moneter syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memiliki peran strategis dalam mengelola likuiditas tanpa bergantung pada suku bunga. Namun, mereka masih menghadapi tantangan likuiditas di pasar sekunder. Penelitian ini, berdasarkan teori tersebut, menemukan celah penelitian atau gap penelitian tentang bagaimana kebijakan yang tidak menggunakan instrumen suku bunga konvensional menanggapi tekanan eksternal. Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah analisis penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan intervensi pasar valuta asing sebagai instrumen pro-market utama selama eskalasi geopolitik di Timur Tengah pada tahun 2026. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada kenaikan BI-Rate atau penggunaan SBSN, penelitian ini membedah bagaimana strategi mempertahankan suku bunga di level 4,75% melalui optimalisasi SRBI dan intervensi valas mampu menjaga stabilitas Rupiah di angka Rp17.140 per dolar AS sekaligus mempertahankan kesehatan penyaluran kredit perbankan nasional.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari alasan utama mengapa Bank Indonesia memilih instrumen intervensi dan sekuritas rupiah (SRBI) sebagai pengganti suku bunga acuan (BI-Rate), serta mengevaluasi bagaimana hal ini berdampak pada likuiditas dan ketahanan kredit perbankan nasional. Diharapkan kontribusi penelitian ini akan memberikan panduan strategis bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan tindakan moneter yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Penelitian ini meneliti berbagai pertanyaan tentang mengapa Bank Indonesia memprioritaskan instrumen non-suku bunga untuk menjaga stabilitas Rupiah saat terjadi gejolak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menyelidiki alasan di balik keputusan Bank Indonesia menahan kenaikan suku bunga acuan. Penelitian fokus pada analisis mendalam kebijakan moneter yang tidak biasa. Kebijakan itu diambil saat tekanan luar karena gejolak politik di Timur Tengah. Subjek informasi dipilih lewat teknik *purposive sampling*. Data diambil dari dokumen kebijakan resmi, risalah Rapat Dewan Gubernur (RDG), artikel maupun jurnal, serta laporan analisis pasar yang relevan dengan periode konflik di Timur Tengah.

Pengukuran ini tidak menggunakan angka tetapi melakukan identifikasi indikator makroekonomi utama yang memengaruhi pengambilan keputusan. Indikator yang kami lihat meliputi stabilitas nilai tukar Rupiah (\$IDR/USD\$), tingkat inflasi domestik, arus modal keluar (*capital outflow*), dan ketahanan cadangan devisa dengan mengumpulkan data lewat teknik studi dokumentasi dan observasi sekunder dan menelaah data primer kualitatif berupa teks pidato resmi otoritas moneter. Kami juga memakai data sekunder dari laporan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) dan berita ekonomi internasional. Peneliti memetakan seluruh data ke dalam model penelitian. Model penelitian menghubungkan variabel transmisi harga energi dan stabilitas nilai tukar dengan pilihan instrumen intervensi non-suku bunga.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Prioritas Instrumen Moneter Non-Suku Bunga Bank Indonesia

Dalam merespons ketidakpastian pasar di tengah guncangan geopolitik, Bank Indonesia (BI) memilih menggunakan kebijakan moneter dengan lebih mengedepankan instrumen *pro-market* serta strategi diversifikasi mata uang dibandingkan pendekatan konvensional. BI-Rate adalah nilai bunga kebijakan yang mencerminkan posisi dan arah kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Instrumen ini berperan sebagai sinyal utama yang memengaruhi pergerakan likuiditas di pasar uang dan industri perbankan nasional, di mana menurut Fadli et al. (2024 dalam Salim et al., 2026), tingkat suku bunga adalah indikator utama dalam menentukan pilihan masyarakat antara berinvestasi atau menabung karena posisinya sebagai "harga" dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Sejalan dengan hal tersebut, Tanial B et al. (2023 dalam Salim et al., 2026), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kebijakan bunga rendah akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih investasi dan konsumsi, sementara kenaikan suku bunga simpanan justru akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk menabung. Dalam dunia perbankan, tingkat bunga ini sangat memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi pinjamannya, sehingga sebagaimana ditegaskan oleh Padmantlyo and Muqorobin (2011 dalam Astuti et al., 2022). Kenaikan yang tajam dalam suku bunga dapat menyulitkan pelanggan untuk membayar kembali pinjaman. Maka dari itu, langkah BI untuk menahan suku bunga acuan di level sekarang ditujukan untuk mempertahankan ritme pertumbuhan ekonomi domestik agar tidak terhambat oleh meningkatnya biaya pinjaman di sektor riil yang bisa mengganggu stabilitas keseluruhan sistem keuangan.

Instrumen utama yang diandalkan Bank Indonesia (BI) pada periode ini adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yaitu instrumen operasi moneter berbasis pasar (pro-market) yang resmi diperkenalkan pada Agustus

2023. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2024, SRBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang jangka pendek, dengan underlying asset berupa surat berharga milik BI sesuai ketentuan Operasi Moneter. Mengacu pada laporan Deutsche Bank (2024), penerbitan SRBI memiliki tiga tujuan utama, yaitu: memperdalam pasar uang Rupiah dengan menyediakan instrumen yang likuid dan mudah diakses; mengoptimalkan pemanfaatan aset SBN milik BI agar transmisi suku bunga di pasar uang menjadi lebih efektif; serta menarik aliran modal asing (capital inflow) guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, khususnya saat neraca transaksi berjalan mengalami defisit. Melalui penerapan SRBI, BI menjalankan strategi sterilisasi untuk menstabilkan nilai tukar di pasar keuangan sekaligus memisahkan dampak transmisi suku bunga agar tidak langsung memengaruhi sektor perbankan domestik. Bank Indonesia (BI) menerapkan pendekatan menyeluruh untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan intervensi di berbagai aspek, termasuk transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar valuta asing domestik, serta di pasar NDF luar negeri (offshore). Tindakan-tindakan strategis ini mencakup kebijakan Triple Intervention yang secara khusus menargetkan pasar spot, DNDF, dan pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN) untuk mempertahankan sentimen pasar serta meredam spekulasi terhadap dolar AS dengan responsif. Dalam upaya mengontrol keseimbangan likuiditas, BI melakukan perubahan pada posisi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang tercatat mengalami penurunan dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp831,55 triliun pada 13 Maret 2026. Selain itu, terdapat kolaborasi antara kebijakan moneter dan fiskal melalui pembelian SBN yang hingga 16 Maret 2026 telah mencapai total Rp86,16 triliun, di mana Rp46,72 triliun di antaranya berasal dari pasar sekunder. Seluruh transaksi pembelian aset di pasar sekunder tersebut dilakukan dengan cara yang transparan, terukur, dan sesuai dengan mekanisme pasar untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional serta menjaga kredibilitas kebijakan moneter yang ada (Bank Indonesia, 2026).

Strategi penguatan stabilitas eksternal Bank Indonesia (BI) juga ditempuh melalui diversifikasi mata uang dan diplomasi ekonomi berupa kebijakan dedolarisasi, antara lain dengan memanfaatkan *Offshore Chinese Renminbi* (CNH) serta memperluas kerjasama *Local Currency Transaction* (LCT). Dalam sebuah siaran pers resmi, akil Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan jika Bank Indonesia dan Pemerintah secara sinergis mendorong pengembangan *Local Currency Transaction* (LCT) untuk memungkinkan pembayaran bilateral menggunakan mata uang lokal serta meningkatkan efisiensi pasar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Kemenko Perekonomian, 2026). Strategi diplomasi ekonomi ini menjadi bagian penting dari agenda dedolarisasi, di mana pada tahun 2025 LCT telah sukses diimplementasikan bersama enam partner utama, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab dengan hasil yang signifikan. Signifikansi kebijakan ini terlihat dari nilai transaksi pada Januari–Februari 2026 yang menembus USD 8,45 miliar, melonjak pesat dari periode serupa di tahun 2025 yang hanya sebesar USD 3,21 miliar. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengguna yang mencapai 14.621 per Februari 2026. LCT memfasilitasi penyelesaian transaksi lintas negara secara langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing tanpa ketergantungan pada mata uang global dengan bantuan kebijakan *Foreign Exchange Administration* dan peran *Appointed Cross Currency Dealer*, sehingga ketergantungan pada Dolar AS dapat dikurangi. Melalui penguatan LCT dan pemanfaatan *Offshore Chinese Renminbi* (CNH), BI memiliki ruang lebih luas untuk menjaga kebijakan moneter yang akomodatif bagi sektor riil, di mana agenda ini juga sejalan dengan aspirasi Indonesia dalam memperkuat posisi di kancah global melalui diskusi keanggotaan blok BRICS. Pelaksanaan kerangka LCT ini ditujukan untuk memperluas cara pembayaran antar negara, meningkatkan efisiensi dalam pasar, serta memperkuat pasar keuangan untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang pada akhirnya akan memperkuat daya tahan ekonomi negara (Kemenko Perekonomian, 2026). Pengurangan ketergantungan ini memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan kebijakan moneter yang lebih akomodatif di tengah dinamika ekonomi global, sementara aspirasi keanggotaan dalam blok BRICS semakin mempertegas agenda penggunaan mata uang lokal dalam kancah perdagangan internasional.

Dilihat dari perspektif stabilitas sistem keuangan, keputusan Bank Indonesia untuk tidak menaikkan BI-Rate merupakan langkah mitigasi risiko terhadap kondisi kredit perbankan di tengah ketidakpastian global, mengingat kenaikan suku bunga yang terlalu agresif berpotensi mendorong naiknya suku bunga kredit yang dapat membebani daya beli masyarakat serta mengganggu keberlangsungan UMKM. Secara teori, suku bunga kredit mencerminkan harga sumber daya keuangan dan menjadi faktor penting dalam penyaluran kredit, di mana menurut Luru dan Afif (2024), tingkat bunga memiliki dampak negatif terhadap proses penyaluran kredit, di mana suku bunga yang tinggi tidak hanya mengurangi minat untuk meminjam, tetapi juga menghambat prosedur pengembalian. Dengan menjaga BI-Rate tetap stabil, BI memastikan beban cicilan debitur tidak meningkat tajam sehingga risiko kenaikan kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan*, yaitu kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dapat ditekan (Luru & Afif, 2024). Kebijakan ini terbukti mampu menjaga fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan baik, sebagaimana tercermin dalam data Bank Indonesia (2026) yang menunjukkan bahwa kredit perbankan pada Februari 2026 masih tumbuh sebesar 9,37% (yoy). Meskipun terjadi pengetatan pada segmen konsumsi dan UMKM akibat risiko kredit yang relatif tinggi, secara keseluruhan rasio NPL tetap terkendali pada level 2,14% (bruto) per Januari 2026, didukung oleh ketahanan perbankan yang kuat melalui Rasio

Kecukupan Modal sebesar 25,87% (Bank Indonesia, 2026). Dengan stabilitas suku bunga ini, sektor UMKM dan masyarakat terlindungi dari tekanan biaya modal, sehingga fungsi intermediasi perbankan tetap optimal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah gejolak geopolitik global.

3.2 Efektivitas Instrumen Non-Suku Bunga terhadap Nilai Tukar Rupiah dan Kondisi Likuiditas

Tahun 2025 dimulai dengan Bank Indonesia (BI) tetap berhati-hati di tengah ketidakpastian global. Pada rapat Dewan Gubernur Februari 2025, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan BI-Rate pada 5,75%. Fasilitas Deposit tetap berada pada 5,00% dan Fasilitas Pinjaman pada 6,50% (Bank Indonesia, 2025). Langkah yang diambil oleh Bank Indonesia ini bertujuan untuk menjaga proyeksi inflasi pada tahun 2025 dan 2026 tetap dalam rentang $2,5 \pm 1\%$ serta menstabilkan nilai tukar Rupiah sesuai dengan dasar ekonomi yang ada, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi meskipun berada dalam kondisi ketidakpastian global yang tinggi (Bank Indonesia, 2025). Pemerintah memperkuat kebijakan moneter pro-pasar; SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp892,90 triliun, 3,03 miliar dolar AS, dan 587 juta dolar AS sampai pertengahan Februari 2025 (Bank Indonesia, 2025a). Dealer utama yang beroperasi sejak Mei 2024 meningkatkan volume transaksi SRBI di pasar sekunder serta perjanjian repurchase (repo). Dealer utama berkontribusi pada peningkatan transaksi SRBI, yang membantu meningkatkan efektivitas instrumen moneter dalam menstabilkan nilai tukar dan mengendalikan inflasi. (Bank Indonesia, 2025).

Pada bulan Maret 2026, Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan yang baru. Kebijakan tersebut menghadirkan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) sebagai agunan dalam transaksi repo valas (Khaerunnisa, 2026). Erwin Gunawan Hutapea, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, mengungkapkan bahwa kebijakan ini mulai efektif pada tanggal 30 Maret 2026. Sasaran dari kebijakan ini adalah untuk memperbesar kegiatan di pasar sekunder SVBI dan SUVBI (Khaerunnisa, 2026). Fitur repo tersebut memperkuat sifat SVBI dan SUVBI sebagai aset likuid berkualitas tinggi (HQLA). Fitur ini juga menghadirkan pilihan baru bagi perbankan dalam mengatur likuiditas valas (Khaerunnisa, 2026). Inisiatif ini mendukung strategi operasi moneter yang berbasis pasar, serta mempercepat pengembangan pasar uang dan pasar valas (PUVA).

Kebijakan moneter masih berlaku hingga April 2026. Pada RDG tanggal 21-22 April 2026, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate. Suku bunga acuan BI-Rate diturunkan menjadi 4,75%. Suku bunga fasilitas deposito ditetapkan pada 3,75%. Suku bunga fasilitas pinjaman ditetapkan pada 5,5% (Andrianto, 2026). Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi penyesuaian suku bunga. Ia menekankan bahwa strategi tersebut bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dalam menghadapi dampak negatif kondisi global akibat konflik di Timur Tengah. (Andrianto, 2026). Bank Indonesia kata siap memperkuat kebijakan lebih lanjut. Bank Indonesia bertekad menjaga stabilitas Rupiah dan menahan inflasi 2026-2027 pada target $2,5 \pm 1\%$ (Andrianto, 2026). Kebijakan makroprudensial akomodatif terus diperkuat. Kebijakan makroprudensial akomodatif tetap menjaga rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) pada 0% dan meluncurkan program PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia) untuk meningkatkan kredit tinggi (Andrianto, 2026).

Sinkronisasi kebijakan ini menjadi lebih penting karena proyeksi ekonomi global penuh tantangan. Pada pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, yang disampaikan pada 28 November 2025, Gubernur Perry Warjiyo menjelaskan bahwa dunia terus bergolak. Dunia bergolak karena ketidakpastian tinggi. Kebijakan tarif sepihak AS memicu perang dagang. Perang dagang memicu ketidakpastian tinggi. Ketegangan geopolitik terus berlanjut. Ketegangan geopolitik meliputi perang di Ukraina dan perang di Timur Tengah (Bank Indonesia, 2025b). Kebijakan tarif AS menyebut peristiwa "Liberation Day". Peristiwa "Liberation Day" memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan turun dari 3,3% di 2024 menjadi 3,1% di 2025. Perkiraan menunjukkan pertumbuhan akan turun lagi menjadi 3,0% di 2026 (Bank Indonesia, 2025b). Akibatnya, bank sentral di seluruh dunia, termasuk Federal Reserve (The Fed), harus membuat pilihan sulit. Bank sentral menjadi lebih hati-hati dalam menurunkan suku bunga. Penurunan suku bunga lambat memengaruhi aliran modal asing. Penurunan suku bunga juga memengaruhi nilai tukar negara-negara Emerging Markets seperti Indonesia (Bank Indonesia, 2025b). Tekanan eksternal datang, namun perekonomian Indonesia tetap kuat. PTBI 2025 melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional tinggi dan stabil. Sinergi bauran kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas (Bank Indonesia, 2025b). Di bidang moneter, transmisi kebijakan berjalan lancar. Penurunan suku bunga pasar uang terlihat (IndONIA) dan suku bunga SRBI menurun (Bank Indonesia, 2025a). Sektor riil tetap kuat. Pada Januari 2025, kredit perbankan naik 10,27% secara tahunan. Kredit investasi tumbuh 13,22% yoy dan kredit konsumsi naik 10,37% yoy, mendorong kenaikan itu. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tetap tinggi di 26,69%. Rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah, hanya 2,08% bruto (Bank Indonesia, 2025a). Perbankan nasional menunjukkan kondisi sehat dan menyalurkan kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ditingkatkan hingga Rp295 triliun pada Februari 2025 (Bank Indonesia, 2025a).

Stabilitas nilai tukar Rupiah dipengaruhi banyak faktor makroekonomi. Studi akademis yang terbit pada Juni 2025 meneliti apa saja yang menggerakkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS selama periode 2000-2023 (Saputra

& Ht.Suhut, 2025). Peneliti memakai analisis regresi berganda. Peneliti menemukan bahwa suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (PDB) bersama-sama menyumbang 43,33% pada pergerakan nilai tukar Rupiah (Saputra & Ht.Suhut, 2025). Sebagian, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh kuat pada nilai tukar Rupiah. Inflasi berpengaruh tetapi tidak kuat (Saputra & Ht.Suhut, 2025). Hasil penelitian menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi sebagai alat utama untuk memperkuat nilai tukar Rupiah (Saputra & Ht.Suhut, 2025). Kebijakan BI fokus pada menstabilkan nilai tukar lewat instrumen moneter pro-market, sehingga sejalan dengan temuan penelitian.

Bank Indonesia menguatkan dasar ekonomi dan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Laporan Bank Indonesia pada Februari 2025 mencatat bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat cepat. Pembayaran digital mencapai 3,5 miliar transaksi, tumbuh 35,3% (yoy) (Bank Indonesia, 2025a). Adopsi QRIS mendorong pertumbuhan pembayaran digital, volume naik 170,1% (yoy). BI-FAST meningkatkan transaksi menjadi 338,5 juta transaksi (Bank Indonesia, 2025a). Untuk memperkuat ekosistem, pada akhir April 2026 BI akan meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI). Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) akan dilakukan lewat acara Hackathon dan Digdaya. BI juga akan memperluas QRIS Antarneegara ke Tiongkok (Andrianto, 2026). Langkah ini mewujudkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Langkah ini juga selaras dengan program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) untuk memperluas digitalisasi di daerah (Andrianto, 2026).

Secara keseluruhan, kebijakan dan pergerakan ekonomi antara 2025 dan April 2026 menunjukkan usaha bersama untuk menjadi stabil dan tumbuh. Melihat BI memutuskan untuk menjaga bahkan mengurangi suku bunga acuan secara pelan-pelan, dari 5,75% di awal 2025 menjadi 4,75% di April 2026. Keputusan suku bunga acuan diambil dengan hati-hati sambil terus menguatkan alat pasar uang, misalnya dengan menjadikan SVBI/SUVBI sebagai underlying repo valas (Khaerunnisa, 2026; Bank Indonesia, 2025a; Andrianto, 2026). Semua ini terjadi di tengah pelambatan ekonomi global. Pelambatan itu diperkirakan akan terus sampai tahun 2026 (Bank Indonesia, 2025b). Kekuatan ekonomi negara terlihat dari pertumbuhan kredit yang baik dan sistem perbankan yang kuat. Kekuatan itu menjadi dasar utama (Bank Indonesia, 2025a). Kita masih menghadapi tantangan ke depan. Tantangan utama adalah menjaga daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing di tengah perubahan suku bunga global. Bank Indonesia, Pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bekerja sama erat untuk menjaga momentum menuju Indonesia Emas (Andrianto, 2026; Bank Indonesia, 2025b).

3.3 Efektivitas Instrumen Non-Suku Bunga dalam Mengendalikan NPL dan Mendorong Pertumbuhan Kredit Perbankan

Kebijakan yang tidak berfokus pada suku bunga, termasuk alat makroprudensial seperti Rasio Kecukupan Modal, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan (LDR) atau Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Rasio Pinjaman terhadap Nilai (LTV), serta Giro Wajib Minimum, memainkan peran penting dalam memengaruhi kondisi penyaluran kredit oleh bank di Indonesia, terutama dalam upaya mengatasi risiko kredit yang bermasalah (tanpa bergantung pada fluktuasi suku bunga acuan). Periode 2021-2026 menjadi momentum krusial di mana kebijakan ini diterapkan secara intensif pasca-pandemi COVID-19 untuk mendukung pemulihan ekonomi, dengan pertumbuhan kredit perbankan mencapai rata-rata 8-12% *year-on-year* (yoy) sambil menjaga NPL agregat tetap rendah di kisaran 2-3%, sebagaimana laporan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara konseptual, kebijakan ini berfungsi melalui mekanisme regulasi yang membatasi ekspansi kredit berlebihan, di mana CAR minimum di atas 20% memastikan bank memiliki bantalan modal yang kuat untuk menyerap potensi kerugian, sehingga mendorong penyaluran kredit berkualitas tinggi hingga 20-25% sambil menekan probabilitas NPL. Sementara itu, RIM yang dilonggarkan menjadi 87,5% dari dana pihak ketiga (DPK) pada 2026 memprioritaskan alokasi kredit ke sektor riil seperti UMKM dan infrastruktur, menghasilkan peningkatan penyaluran sebesar 9,96% pada Januari 2026 dengan NPL stabil di bawah 5%.

Penelitian empiris dari berbagai jurnal periode 2021-2026 secara konsisten menunjukkan bahwa instrumen non suku bunga lebih efektif daripada penyesuaian suku bunga dalam mengelola siklus kredit, misalnya studi Musytari (2025) pada bank swasta menemukan koefisien GWM positif signifikan terhadap NPL sementara LTV berpengaruh negatif, menjelaskan 63,87% variasi risiko kredit. Demikian pula, analisis pada bank LQ45 oleh Sari, L. et al. (2021) mengonfirmasi bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit, sedangkan NPL justru negatif, dengan suku bunga kredit tidak signifikan secara statistik. Efektivitas ini semakin terlihat pada relaksasi pasca-pandemi, di mana BI menurunkan GWM dan LTV hingga 100% untuk KPR pada 2021-2022, menghasilkan tambahan kredit Rp16.833 triliun namun dengan kenaikan NPL sementara di segmen konsumsi yang berhasil dikendalikan melalui penguatan CAR. Laporan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) BI edisi 46 (2026) menegaskan bahwa ruang penyaluran kredit masih terbuka lebar berkat kebijakan makroprudensial longgar, dengan *stress test* membuktikan ketahanan perbankan terhadap guncangan ekonomi.

Lebih lanjut, interaksi antar-instrumen ini menciptakan efek penguatan bersama; misalnya, kombinasi RIM dan LTV mengurangi *over-lending* di sektor properti, di mana LTV 80-100% membatasi pinjaman berbasis agunan longgar, sehingga NPL properti turun 15-20% dibandingkan periode pra-relaksasi. Penelitian Kusumawardani, A. (2023) memperkuat temuan ini, dengan DPK dan NPL sebagai prediktor utama penyaluran kredit, di mana suku

bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan portofolio. Sementara itu, jurnal OJK (2021) menyoroti bagaimana relaksasi non suku bunga menjaga stabilitas di tengah pelemahan ekonomi global, dengan Koalisi Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan insentif 0,5% GWM bagi bank yang menurunkan suku bunga deposito dan kredit. Dampak pro-siklikal muncul ketika relaksasi berlebih, seperti peningkatan LDR di atas 90% yang sempat memicu NPL UMKM hingga 3-5% pada 2022, tetapi penguatan GWM pada 2025-2026 berhasil menormalkan rasio ke level aman.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini tidak hanya menjaga kesehatan kredit domestik tetapi juga selaras dengan tren global pasca-pandemi, di mana regulator seperti Federal Reserve dan ECB mengadopsi pendekatan serupa untuk hindari gelembung aset. Di Indonesia, koordinasi BI-OJK melalui RDKB (Rapat Dewan Kebijakan) Maret 2026 memastikan implementasi yang adaptif, dengan NPL bruto 2,05% per Desember 2025 sebagai bukti keberhasilan. Namun, tantangan tetap ada, seperti vulnerabilitas segmen konsumsi terhadap inflasi dan interaksi dengan BI Rate yang kadang mengurangi efektivitas GWM, sebagaimana dianalisis oleh Zainuri, et al. (2021). Implikasi kebijakannya jelas: pertahankan pendekatan longgar pro-growth dengan monitoring real-time NPL via AI, optimalkan DPK murah untuk patuhi rasio, dan hindari arbitrage antar-regulator untuk maksimalkan intermediasi ke sektor produktif.

Secara keseluruhan, pengaruh kebijakan non suku bunga terhadap kesehatan penyaluran kredit perbankan Indonesia 2021-2026 bersifat positif dan dominan, dengan bukti empiris dari jurnal dan laporan resmi menunjukkan pengendalian NPL efektif sambil mendorong pertumbuhan kredit berkelanjutan, menjadikannya pilar utama resiliensi sistem keuangan di tengah ketidakpastian global. Pendekatan ini membuktikan bahwa regulasi struktural lebih unggul dalam mengelola risiko jangka panjang dibandingkan instrumen moneter konvensional, membuka peluang penelitian lanjutan tentang integrasi dengan teknologi fintech untuk prediksi NPL yang lebih presisi.

4. Kesimpulan

Bank Indonesia (BI) menyiapkan strategi untuk tahun 2026. Gejolak geopolitik global dan lonjakan harga energi menjadi tantangan. Bank Indonesia (BI) memilih pakai instrumen moneter non-suku bunga. Tujuannya menjaga nilai tukar Rupiah tetap stabil. Bank Indonesia (BI) tidak mau pertumbuhan ekonomi domestik terhambat. Saat ini Rupiah tertekan, nilai tukar turun sampai Rp17.140 per dolar AS. Karena itu Bank Indonesia (BI) memutuskan tetap pegang suku bunga acuan (BI-Rate) di 4,75%. Kebijakan itu mencegah biaya pinjaman naik. Biaya pinjaman tinggi akan membebani sektor riil. Sebagai gantinya, BI mengoptimalkan penggunaan instrumen pro-pasar seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mencapai Rp885,41 triliun dan menerapkan strategi *Triple Intervention* di pasar valas untuk menarik aliran modal asing serta meredam spekulasi.

Selain instrumen sekuritas, efektivitas kebijakan moneter BI diperkuat melalui diversifikasi mata uang dan diplomasi ekonomi berupa kebijakan dedolarisasi melalui kerangka *Local Currency Transaction* (LCT). Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, termasuk pemanfaatan *Offshore Chinese Renminbi* (CNH), telah terbukti secara signifikan mengurangi ketergantungan pada Dolar AS dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan nasional. Keberhasilan langkah ini terlihat dari peningkatan tajam nilai transaksi LCT dan keberhasilan BI dalam menjaga inflasi tetap rendah serta menjaga daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing di tengah kelesuan ekonomi global.

Dari sisi stabilitas sistem keuangan, kebijakan non-suku bunga terbukti efektif menjaga kesehatan penyaluran kredit perbankan nasional. BI-Rate tetap stabil menekan risiko kenaikan suku bunga kredit, sehingga beban cicilan debitur tetap terkendali dan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) tetap aman (2,14% bruto). Kebijakan makroprudensial yang ramah seperti insentif likuiditas mendukung perbankan nasional menjalankan fungsi perantara dengan pertumbuhan kredit 9,37% (yoy). Integrasi instrumen pro-pasar dan kebijakan struktural menciptakan resiliensi ekonomi kuat bagi Indonesia. Resiliensi ekonomi kuat membantu Indonesia menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Reference

- Andrianto, R. (2026, April 22). Lengkap! Keputusan BI tahan lagi suku bunga acuan 4,75% di April 2026. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260422162213-17-728983/lengkap-keputusan-bi-tahan-lagi-suku-bunga-acuan-475-di-april-2026>
- Astuti, S. P., Harini, D., & Riono, S. B. (2022). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Jangka Waktu Terhadap Kredit Macet (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Masyarakat Kertasinduyasa, Jatibarang, Brebes). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 1-7. Retrieved From <https://doi.org/10.51903/Jiab.V2i2.157>
- Bank Indonesia. (2025a). Tinjauan kebijakan moneter Februari 2025. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/TKM-Februari-2025.aspx>
- Bank Indonesia. (2025b). Buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025: Sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/Buku_PTBI_2025.pdf
- Bank Indonesia. (2026). Kajian stabilitas keuangan (KSK) No. 46: Makroprudensial aman, perbankan tahan. Bank Indonesia.
- Celesta, F., & Ariesa, Y. (2022). Faktor Bi Rate, Inflasi Dan Kurs Rupiah Terhadap Pembiayaan Kredit Umkm. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 3(2), 144-157. Retrieved from <https://doi.org/10.34012/jebim.v3i2.2232>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10840>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Judijanto, L., Syaiful, M., & Lubis, M. M. (2024). Pengaruh Kebijakan Moneter dan Stabilitas Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(01), 7–15. <https://doi.org/10.58812/sek.v3i01.461>
- Khaerunnisa. (2026, Maret 22). BI tetapkan SVBI-SUVBI sebagai underlying transaksi repo valas. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/5500118/bi-tetapkan-svbi-suvbi-sebagai-underlying-transaksi-repo-valas>
- Kusumawardani, A. (2023). Analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), tingkat suku bunga, dan non performing loan (NPL) terhadap penyaluran kredit perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 115-129.
- Laili, S. N. (2025). Peran SBSN dalam Kebijakan Moneter Syariah: Studi atas Operasi Pasar Terbuka oleh Bank Indonesia. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(02), 201–209. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.225>
- Luru, D. J., & Afif, A. S. (2024). Pengaruh Kredit Bermasalah, Permodalan dan Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan. *Journal of Advances in Digital Business and Entrepreneurship*, 3(01), 14-25. Retrieved From <https://intropublica.org/index.php/jadbe/article/view/122>
- Musytari. (2025). Efektivitas instrumen makroprudensial GWM dan LTV terhadap risiko kredit pada bank swasta nasional. *Jurnal Riset Keuangan Perbankan*, 14(1), 33-47.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan perkembangan kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK Press.
- Salim, D., Stefvy, S., Afiani, D., & Salsabila, A. S. (2026). Pengaruh Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Jumlah Kredit Perbankan Di Indonesia Periode Tahun 2020-2023. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1162-1179. Retrieved From <https://Padangjurnal.Web.Id/Index.Php/Menulis/Article/View/258/251>
- Saputra, J., & Ht.Suhut, M. (2025). Factors affecting Rupiah exchange rate on US Dollar. *Journal of Sustainable Economics*, 3(1), 45-58. <https://talenta.usu.ac.id/jse/article/view/21055>
- Sari, L., et al. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kredit pada perbankan LQ45 di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 4(2), 88-102.
- Taufiq, M., Pramana, M., & Lipursari, A. (2024). Pengaruh Kurs, Deposito dan BI Rate terhadap Kredit (Studi Empiris Pada Bank Umum Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 13(02), 1114–1126. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/jiab.2024.48143>
- Zainuri, et al. (2021). Interaksi kebijakan moneter dan makroprudensial: Tantangan pengendalian inflasi dan stabilitas sistem keuangan pasca-pandemi. *Jurnal Ekonomi Makro Indonesia*, 6(3), 201-218.